

ABSTRAK

Fatah Zainuri, NIM. 126103202119, Penegakan Hukum Terhadap Sepeda Motor Kustom Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Yusron Munawir, S.H.I, M.H

Kata Kunci: penegakan hukum, sepeda motor kustom, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penegakan hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum terhadap pengguna atau penggiat sepeda motor kustom di jalan. Hal ini terjadi penegakan hukum akibat tidak dilakukannya registrasi terhadap sepeda motor kustom yang dikendarai. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor merupakan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan kustomisasi kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, kendaraan penumpang, dan kendaraan muatan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kustomisasi sepeda motor dapat dilakukan, namun harus adanya registrasi kendaraan. Registrasi terhadap sepeda motor kustom ini tidak berjalan akibat beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, hal tersebut akibat bengkel kustom hampir tidak ada yang memiliki sertifikat kustom. Dengan demikian sepeda motor kustom tersebut tidak memiliki *legalitas* hukum dan dilakukan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum (kepolisian).

Fokus Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor pada sepeda motor kustom di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana problematika penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor? 3) Bagaimana Perspektif hukum islam terkait penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor pada sepeda motor kustom di Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui problematika penegakan hukum terhadap

pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. 3) Untuk mengetahui Perspektif hukum islam terkait penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor kustom nonregister berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Peneliti menggunakan metode penelitian jenis yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan melakukan *membercheck*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. a) Faktor hukum, peraturan tersebut merupakan aturan pelaksana berkaitan dengan kustomisasi kendaraan. Kendaraan kustom yang telah melakukan registrasi ditindak dengan sanksi administrasi sesuai Pasal 56 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 sedangkan yang belum diregistrasi dikenakan Pasal 285 Undang-Undang 22 Tahun 2009. b) Faktor penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya telah sesuai aturan yang berlaku. c) Faktor sarana dan fasilitas, dalam penegakan hukum fasilitas dan sarana telah memadai. 2) Problematika Penegakan Hukum Terhadap Sepeda Motor Kustom Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. a) Faktor hukum, belum terlaksana peraturan tersebut dan aturan penahanan dan penyitaan kendaraan kustom tidak menjadikan efek jera masyarakat. b) Faktor penegak hukum, Dirjen Perhubungan belum melakukan penindakan akibat hampir tidak ada sepeda motor kustom yang diregistrasi dan aparat yang tidak sinkron dalam upaya registasi kendaraan bermotor kustom. c) Faktor fasilitas dan sarana, tempat registrasi kendaraan kustom masih terpusat belum ke daerah-daerah. d) Faktor masyarakat, pengguna kustom dan bengkel kustom telah paham terhadap larangan kendaraan kustom yang tidak diregistrasi tetapi aturan tersebut tidak terlaksana. e) Faktor kebudayaan, lemahnya budaya tertib lalu lintas dalam menjaga keselamatan berkendara. 3) Perspektif Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Sepeda Motor Kustom Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, berdasarkan persepektif hukum islam termasuk dalam konsep hukum islam *hifdzun nafs* yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan pengeluaran berlebihan keuangan yang dijelaskan dalam Al-Maidah Ayat 32 dan Al-Furqan Ayat 68. Selain itu terdapat kaidah hukum islam yaitu *maslahah mursalah* dalam kaidah hukum islam ini berkaitan dengan keselamatan, industri dan eksepresi. Juga ditegaskan dalam surat An-Naml Ayat 68, Al-Baqarah Ayat 185, dan Hadist Riwayat nasa'i.

ABSTRACT

Fatah Zainuri, NIM. 126103202119, Law Enforcement Against Custom Motorcycles Based on Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Motor Vehicle Customization (Case Study in Tulungagung Regency), Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor Yusron Munawir, S.H.I, M.H

Keywords: law enforcement, custom motorcycle, Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2023

This research was motivated by law enforcement carried out by law enforcement agencies against users or activists of custom motorcycles on the road. This happened by law enforcement due to non-registration of custom motorcycles driven. Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Motor Vehicle Customization is an implementing regulation relating to the customization of motor vehicles, be it motorcycles, passenger vehicles, and cargo vehicles. In the regulation, it is explained that motorcycle customization can be done, but vehicle registration must be carried out. Registration of this custom motorcycle does not run due to several requirements that are not met, this is because almost no custom workshops have custom certificates. Thus, the custom motorcycle does not have legal legality and is carried out law enforcement by law enforcement agencies (police).

The focus of this research is: 1) How is law enforcement against non-registered custom motorcycle users based on Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2023 concerning Motor Vehicle Customization on custom motorcycles in Tulungagung Regency? 2) What is the problem of law enforcement against non-registered custom motorcycle users based on Ministerial Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Customization of Motor Vehicles? 3) What is the perspective of Islamic law regarding law enforcement against non-registered custom motorcycle users based on Ministerial Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Customization of Motor Vehicles? The objectives of this study are: 1) To determine law enforcement against non-registered custom motorcycle users based on the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Motor Vehicle Customization on kutom motorcycles in Tulungagung Regency. 2) To determine the problems of law enforcement against non-registered custom motorcycle users based on Ministerial Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Customization of Motor Vehicles. 3) To know the perspective of Islamic law regarding law enforcement against nonregistered custom motorcycle users based on . Ministerial Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Customization of Motor Vehicles.

The research method used by researchers is a type of empirical juridical research using qualitative and statutory approaches. The data collection techniques

are through observation, interviews, documentation, and literature studies. While data analysis techniques are by analysis and qualitative. Checking the validity of the data that researchers use is by extending observations, triangulasi, using reference materials, and conducting memberchecks

The results of this study show that: 1) law enforcement against the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Motor Vehicle Customization. a) Legal factors, these regulations are implementing rules relating to vehicle customization. Custom vehicles that have registered are subject to administrative sanctions according to Article 56 of the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2023, while those that have not been registered are subject to Article 285 of Law 22 of 2009. b) Law enforcement factors, in carrying out their duties in accordance with applicable regulations. c) Factors of facilities and facilities, in law enforcement facilities and facilities have been adequate. 2) Law enforcement problems against custom motorcycles based on Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2023 concerning Motor Vehicle Customization. a) Legal factors, the regulation has not been implemented and the custom vehicle detention and confiscation rules do not have a deterrent effect on the community. b) Law enforcement factors, the Director General of Transportation has not taken action due to almost no custom motorcycles being registered and officials who are not synchronized in efforts to register custom motor vehicles. c) Factors of facilities and facilities, the place of registration of custom vehicles is still centralized not to the regions. d) Community factors, custom users and custom workshops have understood the prohibition of unregistered custom vehicles but the rule has not been implemented. e) Cultural factors, weak traffic orderly culture in maintaining driving safety. 3) Islamic Legal Perspective on Law Enforcement Against Custom Motorcycles Based on the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 45 of 2023 concerning Motor Vehicle Customization, based on the perspective of Islamic law is included in the concept of Islamic law *Hifdzun Nafs* relating to safety, health and financial overspending described in Al-Maidah Verse 32 and Al-Furqan Verse 68. In addition, there are rules of Islamic law, namely *maslahah mursalah* in the rules of Islamic law related to safety, industry and exception. It is also affirmed in Surah An-Naml Verse 68, Al-Baqarah Verse 185, and Hadith Narrated nasa'i.

المخلص

فتح الزينوري، رقم التسجيل ١٢٦١٠٣٢٠٢١١٩، تطبيق القانون على الدرجات النارية المعدلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم وزير النقل ٤٥ لعام ٢٠٢٣ حول تخصيص المركبات (دراسة حالة في محافظة تلونجاغونغ)، برنامج دراسات القانون، الدستور، جامعة الإسلام الحكومية سيد علي رحمت الله تلونجاغونغ، ٢٠٢٤، المشرف يسرون مناوير، بكالوريوس الشريعة، ماجستير في الحقوق

كلمات مفتاحية: تطبيق القانون، الدرجات النارية المعدلة، لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣

تم تدفع هذه الدراسة من قبل تنفيذ القانون الذي تنفذه الهيئات القضائية ضد مستخدمي أو عشاق درجات النارية المعدلة على الطريق يحدث هذا التنفيذ القانوني نتيجة لعدم تسجيل درجات النارية المعدلة التي يتم قيادتها. تعتبر لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات من التنظيمات التنفيذية المتعلقة بتخصيص المركبات الآلية، سواء كانت درجات نارية أو مركبات ركاب أو مركبات حمولة. يشرح هذا اللائحة أنه يمكن تخصيص درجات النارية، ولكن يجب تسجيل المركبة. لم يتم تنفيذ تسجيل درجات النارية المعدلة بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، وهذا بسبب ندرة ورش العمل المعدلة التي تمتلك شهادة تخصيص. وبالتالي، لا تمتلك درجات النارية المعدلة هذه شرعية قانونية ويتم تنفيذ القانون من قبل هيئة تنفيذ القانون (الشرطة)

تتمحور هذه الدراسة حول: ١ (كيفية تنفيذ القانون ضد مستخدمي درجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات على درجات النارية المعدلة في محافظة تلونجاغونغ؟) ٢ (ما هي مشكلة تنفيذ القانون ضد مستخدمي درجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات؟) ٣ (ما هي النظرة الشرعية الإسلامية المتعلقة بتنفيذ القانون ضد مستخدمي درجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات؟) أما أهداف هذه الدراسة فهي: ١ التعرف على تنفيذ القانون ضد مستخدمي درجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات على درجات النارية المعدلة في محافظة تلونجاغونغ. ٢ (التعرف على مشكلة تنفيذ القانون ضد مستخدمي درجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات. ٣ (التعرف على النظرة الشرعية الإسلامية المتعلقة بتنفيذ القانون ضد مستخدمي درجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات

يستخدم الباحثون أساليب البحث من النوع القانوني التجريبي مع مناهج القضايا والتشريعات. يتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق والدراسات الأدبية. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل النوعي. لضمان صحة البيانات ، يقوم الباحثون بتوسيع الملاحظات ، والتثليث ، واستخدام المواد المرجعية ، وإجراء عمليات فحص الأعضاء.

نتائج هذا البحث تشير إلى ما يلي: ١) (تنفيذ القانون بموجب لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات. أ) (العوامل القانونية، تعتبر هذه اللائحة تنظيمًا تنفيذيًا يتعلق بتخصيص المركبات. تتم معاقبة المركبات المخصصة التي تم تسجيلها بعقوبات إدارية وفقًا للمادة ٥٦ من لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣، بينما يتم تطبيق المادة ٢٨٥ من قانون النقل رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ على تلك التي لم تُسجل بعد. ب) (العوامل المتعلقة بتنفيذ القانون، قامت الجهات القضائية بأداء واجباتها وفقًا للقوانين السارية. ج) (العوامل المتعلقة بالمرافق والوسائل، كانت المرافق والوسائل المتاحة كافية لتنفيذ القانون

٢) (مشكلات تنفيذ القانون ضد مستخدمي دراجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات. أ) (العوامل القانونية، لم يتم تنفيذ اللائحة بعد وإجراءات الاحتجاز والمصادرة للمركبات المخصصة لم تثمر في تحقيق رادع للمجتمع. ب) (العوامل المتعلقة بتنفيذ القانون، لم تقم المديرية العامة للنقل باتخاذ إجراءات نتيجة لندرة دراجات النارية المعدلة المسجلة وعدم تناغم الجهات المعنية في جهود تسجيل المركبات المعدلة. ج) (العوامل المتعلقة بالمرافق والوسائل، لا تزال مراكز تسجيل المركبات، المعدلة متركزة في مكان واحد ولم تتوزع بعد على المناطق. د) (العوامل المتعلقة بالمجتمع تفهم مستخدمي ورش العمل المعدلة والبنائيات المخصصة للمعرفة القانونية بشأن العربات غير المسجلة ولكن لم يتم تنفيذ تلك القواعد. هـ) (العوامل الثقافية، ضعف ثقافة الامتثال لقواعد المرور في الحفاظ على سلامة القيادة

٣) (النظرة الشرعية الإسلامية لتنفيذ القانون ضد مستخدمي دراجات النارية المعدلة غير المسجلة بناءً على لائحة وزير النقل رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن تخصيص المركبات، وفقًا للنظرة الشرعية الإسلامية، يندرج ذلك ضمن مفهوم حفظ النفس في الإسلام الذي يتعلق بالسلامة والصحة والتخلص من الإنفاق المفرط الذي يُوضح في سورة المائدة الآية ٣٢ وسورة الفرقان الآية ٦٨. بالإضافة إلى ذلك، هناك قاعدة قانونية إسلامية تسمى المصلحة المرسله وفي هذه القاعدة تتعلق بالسلامة والصناعة والتعبير. ويؤكد ذلك في سورة النمل الآية ٦٨، سورة البقرة الآية ١٨٥، وحديث نسائي